

fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Khairudin *et al.* (2019) yang mengatakan bahwa kemandirian keuangan dan efisiensi keuangan daerah daerah memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian fiskal pada masing-masing daerah. Kedua, mengetahui sejauh mana anggaran pemerintah daerah digunakan secara efisien untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan pada masing-masing daerah. Ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kemandirian fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah melihat hasil olah data dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan menjadi 3 poin yakni;

- (1) Secara umum, kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal yang dilihat dari kemandirian fiskal di Indonesia pada tahun 2012-2017 masih termasuk dalam kategori cukup dan kecil. Pada tingkat provinsi, terdapat dua provinsi (6,90%) yang termasuk dalam kategori sangat kecil yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sebanyak 51,72% provinsi termasuk dalam kategori kecil, 27,59% provinsi termasuk dalam kategori cukup, dan 13,72% provinsi termasuk dalam kategori besar. Pada tingkat kabupaten/kota, sebanyak 70,59% kabupaten/kota masih termasuk dalam kategori sangat kecil. Sebanyak 28,96% kabupaten/kota termasuk dalam kategori kecil, sebanyak 0,23% kabupaten/kota termasuk dalam kategori cukup, dan sebanyak 0,23% kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori besar. Hingga tahun 2017 belum ada daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang memiliki nilai DDF mencapai kriteria sangat besar. Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kategori besar berada pada Pulau Jawa sementara Provinsi yang termasuk dalam kategori sangat kecil berada pada Pulau Papua. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi dari masing-masing daerahnya sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah agar kemandirian dalam hal keuangan daerah dapat tercapai.
- (2) Pulau Jawa memiliki nilai efisiensi penggunaan anggaran tertinggi baik di bidang kesehatan maupun pendidikan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, Pulau

Jawa memiliki nilai efisiensi penggunaan anggaran tertinggi di bidang kesehatan sedangkan Pulau Maluku memiliki nilai efisiensi tertinggi di bidang pendidikan. Secara umum, seluruh nilai efisiensi penggunaan anggaran di tingkat provinsi baik bidang pendidikan maupun kesehatan memiliki trend meningkat dari tahun 2012 hingga 2017. Berbeda dengan hal tersebut, pada tingkat kabupaten/kota, nilai efisiensi penggunaan anggaran di bidang pendidikan memiliki trend meningkat dari tahun 2012 hingga 2017, namun sebaliknya, nilai efisiensi penggunaan anggaran di bidang kesehatan dari tahun 2012 hingga 2017 terlihat adanya penurunan. Secara keseluruhan tingkat efisiensi di Indonesia pada tahun 2012-2017 baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota masih inefisien. Hal tersebut dapat terlihat dari skor efisiensi masing masing wilayah yang masih sangat rendah. Hal tersebut mengindikasikan adanya pemborosan dalam penggunaan anggaran. Penulis menduga adanya program atau fasilitas yang masih belum tepat sasaran sehingga akan lebih baik apabila dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya inefisiensi.

- (3) Desentralisasi fiskal, efisiensi penggunaan anggaran di bidang pendidikan, dan efisiensi penggunaan anggaran di bidang kesehatan signifikan secara statistik berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal memang betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan teori federalisasi fiskal yang dikemukakan oleh hayek (1945). Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat uang berarti untuk pemerintah perlu melakukan yang terbaik dalam menggunakan anggaran baik di bidang kesehatan ataupun pendidikan karena hal tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka, saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam wajib pajak. Selain itu, meningkatkan skor efisiensi penggunaan anggaran baik di bidang kesehatan maupun pendidikan, karena baik nilai efisiensi ataupun DDF sudah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode 2012-2017. Saran untuk peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti lebih dalam mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat adalah melanjutkan bahasan mengenai apa yang menyebabkan suatu daerah menjadi tidak efisien atau

bagaimana cara meningkatkan efisiensinya. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat melihat efisiensi penggunaan anggaran di bidang lain selain pendidikan dan kesehatan.

Daftar Pustaka

- Aulia, N. (2014, Juni). Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. *Economics Development Journal Analysis*, 3(2), 327-336.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2018, Maret 8). *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia, 2012 - 2017 (Ribu Jiwa)*. Retrieved Mei 2020, from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur: <https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/03/08/371/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia-2012---2017-ribu-jiwa-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2013, Desember 30). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2010-2013*. Retrieved Januari 2020, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2013/12/30/9496a9a7b81ecb6b91f4889f/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2010-2013.html>
- Badan Pusat Statistik. (2014, Mei 30). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2012-2013*. Retrieved Januari 2020, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b8632/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-kota-2012-2013.html>
- Badan Pusat Statistik. (2015, April 17). *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2013 - 2014*. Retrieved Januari 2020, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2015/04/17/ee6f3525b9ba8ece29502272/statistik-keuangan-pemerintahan-kabupaten-kota-tahun-2013---2014.html>
- Badan Pusat Statistik. (2016, April 15). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015*. Retrieved Januari 2020, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2016/04/15/c99050fe64a28ec026833abe/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2014-2015.html>
- Badan Pusat Statistik. (2017, Desember 19). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017*. Retrieved Januari 2020, from Badan Pusat Statistik:

- <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/19/ca87805ec74d2c852bf2927b/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2014-2017.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018, April 19). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017 Buku 1 (Sumatera, Jawa)*. Retrieved Januari 2020, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/5ec501731f50b8899346d0ca/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2016-2017-buku-1--sumatera--jawa-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2018, April 19). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017 Buku 2 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)*. Retrieved Januari 2020, from Badan Pusat Statistik: [Shttps://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/d77837efa97c398b0a8b030c/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2016-2017-buku-2--bali--nusa-tenggara--kalimantan--sulawesi--maluku--papua-.html](https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/d77837efa97c398b0a8b030c/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2016-2017-buku-2--bali--nusa-tenggara--kalimantan--sulawesi--maluku--papua-.html)
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota [Metode Baru], 2010-2019*. Retrieved Februari 2020, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/17/1771/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-metode-baru-2010-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indeks Pembangunan Manusia*. Retrieved April 2020, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Bröthaler, J. (2010). Effects of Fiscal Decentralization on Public Sector Growth in Austria. *Public Finance and Management*, 10, 169-205.
- Coelli, T. J., Rao, D. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). Data Envelopment Analysis. In T. J. Coelli, D. P. Rao, C. J. O'Donnell, & G. E. Battese, *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis* (pp. 161-181). Australia: Springer.
- Desita, P. N. (2015, Oktober). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010-2014). *Jom FEKON*, 2(2), 1-13.
- Dyah, S. M. (2012). The impacts of Fiscal Decentralization on Income Inequality in Indonesia. *Public Management Research*, 6, 1-20. Retrieved from Core: <https://core.ac.uk/download/pdf/144437007.pdf>

- Haryanto, J. T. (2015, Agustus 31). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. Retrieved Februari 2020, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya/>
- Hayek, V. F. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4), 519-530.
- Joshi, R. (2018, September). *Pendanaan Publik untuk Sekolah Swasta Berbiaya Rendah*. Retrieved Februari 2020, from Neliti: <https://repository.cips-indonesia.org/publications/270461/pendanaan-publik-untuk-sekolah-swasta-berbiaya-rendah#cite>
- Juanda, B., & Handra, H. (2017, Oktober). Kebijakan DAK di Indonesia: Perkembangan dan Permasalahannya. *Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan di Indonesia*, 2, pp. 8-9.
- Katadata. (2018, Januari 31). *Inilah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak 1961*. Retrieved Mei 2020, from Databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961#>
- Khairudin, Tarmizi, R., Indrayenti, & Aminah. (2019). Kinerja Keuangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Daerah di Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 04(03), 194-112.
- Mariyono, J. (2012). Corruption and Welfare: A Simple Econometric Across Countries Analysis. *Economic Journal of Emerging Markets*, 4(1), 63-75.
- Muhammad, R., Mediaty, Indrijawati, A., & Suleman, S. H. (2017). The Effect of Information Content of the Welfare of Incumbents Reelection. *The Business and Management Review*, 9(2), 130-135.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw Hill.
- Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2017). *Kamus*. Retrieved May 2020, from Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI: <http://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-259.pdf>
- Rahman, F. (2012). Desentralisasi Fiskal dan Minimnya Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(2), 103-114.
- Saraswati, E. (2018). Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1-26.

- Scheel, H. (2000). *EMS: Efficiency Measurement System User's Manual*.
- Shahzad, S., & Yasmin, B. (2016). Does Fiscal Decentralisation Matter for Poverty and Income Inequality in Pakistan? *The Pakistan Development Review*, 55(4), 781-802.
- Sidig, D. S. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1).
- Soejoto, A., Subroto, W. T., & Suyanto. (2015). Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 763-771.
- Sow, M., & Razafimahefa, I. F. (2015). Fiscal Decentralization and the Efficiency of Public Service Delivery. *IMF Working Paper*, 1559, 1-29.
- Subdit Informasi Rujukan Statistik BPS. (n.d.). *Angka Harapan Hidup (AHH)*. Retrieved April 2020, from Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/48>
- Subdit Informasi Rujukan Statistik BPS. (n.d.). *Rata-rata Lama Sekolah (MYS)*. Retrieved April 2020, from Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/572>
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditure. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416-424.
- Vo, D. H. (2010). The Economics of Fiscal Decentralization. *Journal of Economic Surveys*, 24(4), 657-679.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta Ekonisia Fakultas Ekonomi.
- Wijaya, D., Haryadi, & Zulgani. (2015). Analisis Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 11-18.
- Yanti, P., & Kustiani, N. A. (2016). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Urusan Kesehatan Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten. *Jurnal info Artha*, 1(1), 81-96.
- Yunan, Z. Y. (2014). Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Pulau Jawa. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 23-44.